



Hk. 04.01 / 234.

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR :KEP. 164 /M.PPN/05/2004

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KAJIAN PRAKARSA STRATEGIS
PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dimasa mendatang, diperlukan suatu strategi pertumbuhan ekonomi baru yang dikenal dengan Knowledge Based Economy (KBE) yaitu perekonomian yang motor penggerak utamanya berbasis produksi, distribusi, dan pemanfaatan pengetahuan dan informasi;
- b. bahwa sesuai dengan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan kajian prakarsa strategis yang bersifat perumusan perencanaan pembangunan dalam mengembangkan konsep landasan strategis dalam bidang sebagaimana disebut dalam huruf a diatas untuk jangka menengah dan panjang;
- c. bahwa untuk menunjang maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, dan b di atas, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Kajian Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Pengembangan Knowledge Based Economy (KBE);
- d. bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan tugasnya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas;

Mengingat...

- Mengingat:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KELOMPOK KERJA KAJIAN PRAKARSA STRATEGIS: PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE).**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Pengembangan Knowledge-Based Economy (KBE) yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Focus Group Discussion (FGD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dan petunjuk mengenai kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA : Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan bertugas untuk merumuskan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

KEEMPAT:...

- KEEMPAT : Focus Group Discussion bertugas memberikan masukan dari berbagai aspek terhadap substansi sesuai dengan bidang pembahasan kepada Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan.
- KELIMA : Sekretariat bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan masing-masing tugasnya, Kelompok Kerja Kajian;
- a. Melakukan berbagai penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan upaya peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan knowledge-based economy;
 - b. Memberikan laporan hasil kerja kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dapat melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Kajian Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Pengembangan Knowledge-Based Economy, antara lain:
- a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. diskusi dengan instansi, lembaga, dan stakeholders lainnya yang terkait; serta
 - c. melakukan kajian;
- KEDELAPAN : Kegiatan kajian diselesaikan dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu pada tahun anggaran 2004 dan 2005 dengan hasil sebagai berikut:
- a. Laporan akhir pada tahun anggaran 2004 adalah *Mapping dan Road Mapping Pengembangan KBE di Indonesia*;
 - c. Laporan akhir pada tahun anggaran 2005 adalah *Master Plan (Blueprint) Pengembangan KBE Indonesia*.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja akan dibantu oleh sebuah Tim Sekretariat yang akan ditentukan dengan keputusan Ketua Kelompok Kerja.
- KESPULUH : Apabila diperlukan, perubahan dalam susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dilakukan melalui keputusan Tim Pengarah.

KESEBELAS :...

- KESEBELAS : Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan memberikan laporan atas perkembangan kegiatan.
- KEDUABELAS : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Pengembangan KBE ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 31 Mei 2004

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Industri dan Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
5. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
8. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
10. Inspektur Utama Bappenas;
11. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 164 /M.PPN/05/2004
Tanggal : 31 Mei 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA KAJIAN PRAKARSA STRATEGIS
PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN KNOWLEDGE-
BASED ECONOMY (KBE)

- I. Tim Pengarah :
1. Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas
 2. Deputi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas
 3. Deputi Bidang Sarana dan Prasana, Bappenas
 4. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
 5. Deputi Bidang Jaringan Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi
 6. Kepala Bdan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Departemen Industri & Perdagangan
 7. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, BBFT
 8. Kepala Badan Penelitian & Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi
- II. Penanggung Jawab
1. Ketua (merangkap anggota) : Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Bappenas
 2. Wakil Ketua (merangkap anggota) : Direktur Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bappenas
- III. Sekretaris Tim (merangkap anggota) : Dr. Ir. Yahya R. Hidayat, MSc
- IV. Anggota Kelompok Kerja :

Tim Perumus dan Rekomendasi Kebijakan (TPRK)

A.1. Inventarisasi...

- A.1. Inventarisasi Masalah & Pendataan Pelaksanaan KBE Indonesia
1. Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA
 2. Dr. Ir. Yahya Rahma Hidayat, MSc
 3. Ir. Montty Giriana, Msc, MCP, Ph.D
 4. Eka Chandra Buana, SE, MA
 5. Drs. Florentinus Kristiartono, MM
 6. Subekti, SE, MM
- A.2. Review Peraturan dan Regulasi Pelaksanaan KBE
1. Drs. Aprizul Gumanti, MA
 2. Mochamad Mustajab, SE, MA
 3. Muhamad Rahmat Mulianda, S.Pi, M.Mar
 4. Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com
- A.3. Studi Banding Pelaksanaan KBE di Negara lain
1. Ir. Hanan Nugroho, MSc
 2. Dr. Ir. Maruhum Batubara, MPA
 3. Dra. Ratna Sri M. Mustikaningsih, MA
 4. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE
- A.4. Penetapan Prakondisi Pelaksanaan KBE di Indonesia
1. Dr. Ir. Mesdin Simarmata, MSc
 2. Ir. Indra Ni Tua, ST, M.Com
 3. Ir. Sidqy LP Prayitno, MA
 4. Rezang Wrihatnolo, SE, MA
- A.5. Renstra Pengembangan SDM dalam Kerangka KBE
1. Dra. Rahma Iryanti, MT
 2. Dr. Ir. Bambang Widiyanto, MA
 3. Ir. Suharti, MA
 4. Drs. Luky Firnandi, MM
- A.6. Renstra Insentif Ekonomi dan Kelembagaan
1. Dr. Ir. Leonard Tampubolon, MA
 2. Dr. Ir. Hedi Muhamad Idris, MSc
 3. Dr. Ir. Himawan Hariyoga, MSc
 4. Suharmen, S.Kom, MSi
- A.7. Renstra Pengembangan ICT
1. Ir. Eddy Satrya, MA
 2. Ir. Dida H. Salya, MA
 3. Ir. Bastian, MBA
 4. Cut Sawalina, SE, MSi
- A.8. Renstra Pengembangan IPTEK dan Sistem Inovasi
1. Ir. Slamet Sudarsono, MPP
 2. Drs. Hadiat, MA
 3. Ir. Hanung Harimba Rahman, SE, MS
 4. Ir. Yudo D. Priadi, MS

Focus Group of Discussion (FGD)

- A.1. Inventarisasi Masalah & Pendataan Pelaksanaan KBE Indonesia
1. Ir. Bemby Uripto, MSc
 2. Drs. Bagus Rumbogo, Ak
 3. Mochamad Nassir, S.Kom, MSi
 4. Drs. Halim Ishak, MM
 5. Ichsan Zurkarnaen, SE, MSc
 6. Thresna Mukti, SH, MPM
 7. Ir. J. Rizal Primana, MSc
 8. Drs. Indra Tjahaja, MA
- A.2. Review Peraturan dan Regulasi Pelaksanaan KBE
1. Diani Sadiawati, SH, LLM
 2. Dra. Sri Rahayu, M.Ed
 3. Dr. Robin Asad Suryo, MA
 4. Drs. Bustang, MSi
 5. Ir. Arif Rahman Hakim, MS
 6. Drs. Tony Sitorus, MPM
 7. Drs. Kurnia Idfi, MSi
 8. Muhamad Arief, SE, MSi
- A.3. Studi Banding Pelaksanaan KBE di Negara lain
1. Dr. Luky Eko Wuryanto, MSc
 2. Lusiana Murty, SE, MA
 3. Ir.Imarita Trihanda, MS
 4. Ir. Amor Sasongko, MSc.Agr
 5. Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahudin,
 6. Agustin Arry Yanna, SS, MA
 7. Sarah Sadiqa, SH, MSc
 8. Ir. Gunsairi, MPM
- A.4. Penetapan Prakondisi Pelaksanaan KBE di Indonesia
1. Raden Widjaja Kusumawardhana, ST, MMIB
 2. Ir. Eryanti Puspa, MM
 3. Yunhri Trima Vabian, SE, MM
 4. Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D
 5. Drs. Putu Riyasa, M.Soc.Sc
 6. Drs. Hadiat, MA
 7. Ir. Salusra Widya, MA
 8. Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP
- A.5. Renstra Pengembangan SDM dalam Kerangka KBE
1. Dr. Ir. Eddy Effendi Tedjakusuma, MA
 2. Dra. Nina Sarjunani, MA
 3. Drs. Setiabudi, MA
 4. Ir. Imarita Trihanda, MS
 5. Dr. Indra Darmawan, MSc

6. Dr. Ir. Leonard ...

6. Dr. Ir. Leonard Tampubolon, MA
 7. Dra. Rd. Siliwanti, MPIA
 8. Erwin Gutama, SE, DEA
- A.6. Renstra Insentif Ekonomi dan Kelembagaan
1. Ir. Bambang Priambodo, MA
 2. Ir. Eiko Wismulyadi, MA
 3. Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA
 4. Dr. Ir. Rd. Endah Murniningtyas
 5. Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA
 6. Dra. Rahma Iriyanti, MT
 7. Drs. Muhamad Arif, MSi
 8. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA
- A.7. Renstra Pengembangan ICT
1. Ir. Gumilang Hardjakoesoema, MSc
 2. Ir. Agung Hardjono, MSEM, MSIS
 3. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP
 4. Mira Tayyiba, ST, MSEE
 5. Jodi Indrajaya, S.Kom
 6. Drs. Hari Nasiri Mochtar, M.Com
 7. Maswedat Haryagung Adji, SE, MPEM
 8. Ir. Mohammad Iqbal Abbas, MBA
- A.8. Renstra Pengembangan IPTEK dan Sistem Inovasi
1. Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA
 2. Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA
 3. Dr. Ir. Suprayoga Adi Suryabrata, MIA
 4. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP
 5. Vivi Andriani, ST
 6. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, MSc
 7. Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi, M.Mar
 8. Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, MSc

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE